JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA

p-ISSN : 2745-7141 e-ISSN : 2746-1920

Jurnal Pendidikan Indonesia
Vol. 6 No. 8 Agustus 2025

Peran Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus di Kabupaten B

Mulyati Kartini
Ilmu Pemerintahan, Universitas Wiralodra, Indonesia
Email: moelyatikartini@gmail.com

Kata kunci:
Kepemimpinan; Kemiskinan; Pemerintah Daerah

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi permasalahan kompleks di berbagai daerah, termasuk Kabupaten B, yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan solusi efektif. Kepemimpinan kepala daerah memiliki pengaruh penting dalam menentukan arah kebijakan, strategi, dan inovasi yang mampu menekan angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan kepala daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten B serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami peran kepemimpinan kepala daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi kebijakan, laporan program, dokumen pemerintah, dan penelitian relevan. Analisis data dilakukan dengan model Huberman & Miles melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten B berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan melalui kebijakan yang terarah dan inovatif. Pemerintah daerah memanfaatkan potensi lokal dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan.

Keywords:
Leadership; Poverty; Local Government

ABSTRACT

Poverty is still a complex problem in various regions, including Regency B, which requires an active role of local governments in creating effective solutions. The leadership of regional heads has an important influence in determining the direction of policies, strategies, and innovations that are able to reduce poverty rates. This study aims to analyze the leadership role of regional heads in poverty alleviation in Regency B and provide policy recommendations that are more targeted and sustainable. This study uses a qualitative method with a case study approach to understand the leadership role of regional heads in poverty alleviation. Data is collected through policy documentation, program reports, government documents, and relevant research. Data analysis is carried out with the Huberman & Miles model through data reduction, data presentation, and drawing valid and accountable conclusions. The results of the study show that the leadership of regional heads in Regency B plays an important role in reducing poverty rates through targeted and innovative policies. Local governments take advantage of local potential and collaborate with various parties to strengthen poverty alleviation programs.

PENDAHULUAN

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada 2025 menunjukkan rata-rata nasional sebesar 8,47%, dengan kemiskinan di perdesaan (11,03%) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (6,73%). Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah berada di Bali (3,72%), diikuti oleh Kalimantan Selatan (3,84%) dan Kepulauan Riau (4,44%), sementara tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua Pegunungan (30,03%), Papua Tengah (28,90%), dan Papua (19,16%). Pola ini mencerminkan kesenjangan antara kawasan barat dan timur Indonesia, serta antara perkotaan dan perdesaan, yang menunjukkan perlunya intervensi khusus untuk daerah tertinggal, terutama di kawasan timur dan pedesaan (BPS, 2025).

Kemiskinan menggambarkan keadaan ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai. Dalam menghadapi permasalahan ini, peran kepemimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten menjadi krusial karena kebijakan dan program yang mereka terapkan dapat secara langsung memengaruhi upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya (Fahrizal. 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 59, dijelaskan bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah, yaitu gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota. Kepala daerah memiliki peran penting dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Indara, 2024). Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan menempatkan kepala daerah sebagai pihak yang berperan aktif dalam mewujudkan tujuan negara (Goiril, 2022). Salah satu tujuan utama tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga secara berkelanjutan Azzahra, A. (2023).

Kesejahteraan sendiri merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menegaskan pentingnya upaya negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Nuranisa, 2022).

Kabupaten B masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup signifikan, ditandai dengan tingginya jumlah penduduk miskin dan ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja. Meskipun telah ada berbagai program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, pelaksanaannya sering kali terkendala oleh kurangnya efektivitas kebijakan, lemahnya koordinasi antar pihak terkait, dan minimnya keterlibatan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya peran kepemimpinan kepala daerah yang mampu merumuskan strategi inovatif, mengoptimalkan potensi lokal, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, sehingga penelitian mengenai peran kepemimpinan

kepala daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten B menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Pratiwi (2022) menjelaskan jika kepemimpinan Wali Kota Bontang menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 4% pada 2021 melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah yang dioptimalkan dengan inovasi berbasis teknologi. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan pada sektor migas dengan mengembangkan potensi pariwisata dan industri, termasuk memanfaatkan pembiayaan CSR. Namun, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan ini masih minim, sehingga kepemimpinan Wali Kota Bontang lebih mencerminkan tipe kepemimpinan administratif yang berfokus pada kebijakan formal sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian Manullang (2022) juga menunjukkan bahwa Kepala Desa Pasar Melintang mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang mengayomi masyarakat dengan memastikan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dilakukan sesuai peraturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Namun, ditemukan adanya kesalahan dalam pelaksanaan di tingkat pemerintah desa karena masih terdapat penerima BLT yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran kepemimpinan kepala daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya meninjau kebijakan formal, tetapi juga menilai bagaimana strategi kepemimpinan, inovasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor diterapkan di Kabupaten B. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas kepemimpinan kepala daerah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan kebijakan yang adaptif, pemanfaatan potensi lokal, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan peran pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam program-program pengentasan kemiskinan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali pemahaman yang komprehensif mengenai peran kepemimpinan kepala daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara kontekstual sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang mencakup arsip kebijakan, laporan program, berbagai dokumen resmi pemerintah daerah dan berbagai penelitian sebelumnya yang relevan, sehingga informasi yang diperoleh relevan dan mendukung analisis mendalam terhadap fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Huberman & Miles yang dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data dilakukan untuk memilah, mengklasifikasi, dan menyederhanakan informasi yang terkumpul agar lebih fokus pada hal

yang penting. Kedua, penyajian data disusun dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah pemahaman hubungan antar-temuan. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan guna memastikan temuan yang diperoleh valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan (Qomarudding & Sa'diyah, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu bentuk nyata dari pencapaian kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan pembangunan. Permasalahan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun, mengatasi kemiskinan bukanlah perkara yang sederhana, sebab sifat kemiskinan itu sendiri bersifat dinamis (Komang & Sudemen, 2025). Artinya, meskipun terdapat individu atau kelompok yang berhasil keluar dari kategori miskin, pada saat yang sama akan muncul kelompok lain yang justru masuk ke dalam kategori tersebut. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemiskinan adalah masalah yang terus bergerak dan berubah, sehingga upaya penanggulangannya pun membutuhkan strategi yang berkelanjutan dan tidak dapat mengandalkan satu pendekatan saja.

Banyak kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi hasilnya belum sepenuhnya efektif. Ketidakefektifan ini menunjukkan perlunya sinergi dan kolaborasi lintas sektor, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri (Pratiwi, 2022). Relevan dengan kondisi ini, keberadaan seorang pemimpin menjadi sangat krusial. Pemimpin memiliki peran strategis dalam mengarahkan jalannya pemerintahan dan menggerakkan seluruh elemen organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin yang baik bertindak sebagai pengambil keputusan, sebagai penggerak, serta pembimbing yang mampu memotivasi aparaturnya untuk bekerja secara kolektif dan efektif (Fakhrizal, 2022).

Kepemimpinan memiliki dimensi yang luas, menurut Kamarasyid (2019), seorang pemimpin idealnya memiliki kemampuan membimbing dan memengaruhi bawahannya secara persuasif sehingga diterima secara sukarela oleh pengikutnya. Sedangkan, pada perspektif yang lebih luas, Pigors dalam Pratiwi (2022) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu aktivitas atau proses dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menjunjung tinggi nilai-nilai kerja sama, mampu menerima kritik dan saran, serta terbuka terhadap proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak. Pendekatan kolaboratif inilah yang pada akhirnya membantu sebuah pemerintahan berjalan dengan lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang rumit dan multidimensional.

Pada kerangka hukum Indonesia, peran kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan daerah telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 59 menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah, yaitu gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota. Kepala daerah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama antara legislatif dan eksekutif. Selain itu, kepala daerah juga memiliki

kewenangan untuk menetapkan berbagai keputusan strategis melalui kebijakan yang bersifat administratif maupun politis (Fakhrizal, 2022).

Peran kepala daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis yang sangat penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama adalah pengentasan kemiskinan. Kepala daerah memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi (Harefa, 2022; Komang & Sudemen, 2025). Visi yang jelas dan komitmen yang kuat dari seorang kepala daerah menjadi landasan utama dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagaimana dicontohkan dalam kasus yang terjadi di Kabupaten B, kepala daerah di wilayah tersebut menunjukkan kepemimpinan yang aktif dan responsif terhadap persoalan kemiskinan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan anggaran daerah secara proporsional untuk mendukung program-program sosial dan ekonomi yang menyasar kelompok masyarakat miskin. Kebijakan anggaran ini menjadi wujud dari keberpihakan kepala daerah terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin sebagai prioritas pembangunan daerah.

Lebih dari itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga sangat ditentukan oleh kemampuan kepala daerah dalam menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kepala daerah di Kabupaten B menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang baik dengan melibatkan perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta unsur masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Kolaborasi ini menciptakan sinergi lintas sektor yang memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sejalan dengan strategi penanggulangan kemiskinan di era saat ini tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal atau semata-mata berbasis bantuan, tetapi harus dilakukan secara sistemik dan menyeluruh dengan memahami akar permasalahan kemiskinan secara lokal (Arifin, 2020). Diagnosis terhadap kemiskinan harus mencakup seluruh aspek yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut, termasuk masalah pengangguran, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, rendahnya produktivitas ekonomi, hingga ketimpangan sosial. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus mencakup intervensi lintas sektor dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat setempat (Sari, 2022).

Merujuk pada tanggung jawab kepemimpinan daerah, kepala daerah memiliki mandat untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Kondisi ini berarti bahwa kepala daerah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai inisiator dan motor penggerak pembangunan yang inklusif. Di Kabupaten B, komitmen kepala daerah dalam menanggulangi kemiskinan tercermin dalam berbagai program dan kebijakan konkret yang telah dan sedang dijalankan (Fakhrizal, 2022).

Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten B mencakup berbagai intervensi, mulai dari bantuan sosial langsung kepada masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga jaminan sosial melalui BPJS untuk meningkatkan perlindungan sosial dasar. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal

usaha, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan koperasi, pemerintah daerah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang usaha lokal yang berkelanjutan.

Selanjutnya, peningkatan akses terhadap layanan dasar juga menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten B. Program diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, penyediaan air bersih, sistem sanitasi yang layak, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan adanya perbaikan infrastruktur dasar, pemerintah daerah menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi masyarakat miskin untuk dapat berkembang secara sosial dan ekonomi. Kemudian, tak kalah penting adalah upaya inovasi lokal yang dirancang sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat Kabupaten B. Program-program inovatif ini mencerminkan adaptasi kebijakan daerah terhadap persoalan kemiskinan yang spesifik, seperti pemberdayaan komunitas berbasis potensi lokal, program padat karya tunai, atau skema pendampingan usaha desa yang dikembangkan secara kolaboratif dengan masyarakat.

Seluruh kebijakan dan program tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan yang efektif memerlukan kepemimpinan daerah yang visioner, responsif, dan kolaboratif. Kepala daerah berperan penting dalam menyusun arah kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan serta memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat yang paling rentan. Namun, di balik berbagai program dan kebijakan yang telah dijalankan, penelitian ini juga mengungkapkan adanya sejumlah kendala yang menghambat efektivitas implementasi di lapangan. Salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah keterbatasan dana. Anggaran yang tersedia di tingkat daerah sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat miskin, sehingga program yang dirancang tidak dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata. Masalah ini semakin kompleks ketika diperhadapkan pada kebutuhan pembangunan lainnya yang juga memerlukan pembiayaan (Utami et al., 2024).

Selain itu, hambatan birokrasi menjadi tantangan tersendiri yang turut memperlambat jalannya program. Prosedur administratif yang panjang, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat lokal membuat pelaksanaan program sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan birokrasi ini juga dapat menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan realisasi di lapangan, terutama jika tidak diiringi dengan pengawasan dan evaluasi yang memadai (Widjaja & Dhanudibroto, 2025). Kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya data akurat mengenai kelompok sasaran. Ketika data tidak valid atau tidak terbarui, maka program bantuan atau pemberdayaan rentan salah sasaran, baik dalam bentuk duplikasi penerima maupun terlewatnya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan (Rahma et al., 2025). Kendala ini menunjukkan pentingnya sistem data yang andal dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, kepala daerah dituntut untuk menjadi sosok yang inovatif. Strategi adaptif menjadi kunci agar program tetap berjalan efektif meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Inovasi bisa muncul dalam bentuk pemanfaatan teknologi untuk mempermudah penyaluran bantuan, membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk memperluas cakupan program, hingga melakukan efisiensi

anggaran agar lebih tepat guna. Kemampuan kepala daerah dalam merespons situasi dengan cepat dan fleksibel sangat menentukan keberhasilan program, khususnya pada pengentasan kemiskinan yang memerlukan intervensi berkesinambungan (Makbul, 2025).

Kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten B memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan angka kemiskinan, yang terlihat dari data statistik yang mencatat penurunan signifikan dalam persentase penduduk miskin selama masa kepemimpinannya. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dalam persepsi masyarakat serta tanggapan positif dari para pemangku kepentingan. Masyarakat menilai bahwa kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten B mampu menghadirkan perubahan konkret, khususnya dalam program-program pemberdayaan dan perlindungan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari adanya sejumlah faktor pendukung yang memperkuat posisi kepala daerah dalam menjalankan perannya. Menurut wawancara, faktor kesuksesan adalah adanya dukungan dari legislatif daerah yang memberikan ruang bagi kepala daerah untuk menetapkan anggaran dan kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Selain itu, tidak kalah penting adalah partisipasi aktif masyarakat, baik dalam bentuk keterlibatan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, maupun dalam bentuk pengawasan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Meski demikian, perjalanan kepemimpinan dalam menanggulangi kemiskinan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang memerlukan perhatian serius. Ketidakstabilan politik lokal dapat mengganggu konsistensi kebijakan dan menghambat kesinambungan program, terutama ketika terjadi pergantian atau ketegangan antar aktor politik. Konflik kepentingan antar elit daerah juga menjadi tantangan tersendiri, karena dapat menciptakan tarik-menarik kepentingan yang berpotensi melemahkan fokus pada tujuan pembangunan sosial. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, menjadi hambatan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan di lapangan.

Menyadari tantangan tersebut, peningkatan kapasitas kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas strategis dan teknokratis kepala daerah, serta pengembangan kelembagaan yang adaptif merupakan rekomendasi utama untuk mendukung efektivitas kepemimpinan dalam jangka panjang (Nurchayo et al., 2024). Peningkatan aspek-aspek tersebut diharapkan membantu kepala daerah merespons dinamika lokal secara lebih cepat serta memimpin upaya pengentasan kemiskinan secara lebih terfokus dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala daerah memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan. Kepemimpinan yang disertai dengan visi yang kuat, kemampuan dalam membuat kebijakan yang relevan dan tepat sasaran, serta keterampilan dalam membangun koordinasi yang solid antar pihak, terbukti mampu mendorong terjadinya perubahan positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten B. Temuan ini menekankan bahwa keberhasilan bukan semata hasil dari program teknis semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat terus berjalan, penting untuk

memperkuat kapasitas kepala daerah, sehingga strategi penanggulangan kemiskinan dapat menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten B terbukti memainkan peran sentral dalam keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Kepemimpinan yang ditopang oleh visi yang jelas, kebijakan yang tepat sasaran, serta koordinasi lintas sektor yang baik mampu mendorong perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program-program yang dijalankan mencakup bantuan sosial langsung, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, hingga inovasi lokal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas implementasi di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, dan kurangnya data akurat, yang semuanya memerlukan perhatian dan pembenahan serius agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah, baik melalui pelatihan, peningkatan kapasitas teknis, maupun penguatan kelembagaan daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor kepemimpinan transformatif pada pengentasan kemiskinan di berbagai daerah dengan pendekatan perbandingan (*comparative study*), guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik kepemimpinan yang efektif dalam desentralisasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, *6*(2), 114-132.

Azzahra, A. (2023). Implementation of good governance in public services at local government. *International Journal of Social Service and Research*, *3*(7), 1899-1906.

Badan Pusat Statistik. (2025, Juli 25). *Persentase penduduk miskin (P0) menurut provinsi dan daerah (persen), 2025.* Diakses dari https://www.bps.go.id

Fakhrizal, Y. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, *7*(1).

Fakhrizal, Y. (2022). Peran kepemimpinan kepala daerah terhadap indeks pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah,* 7(1), 1–26. Retrieved from https://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

Goiril, A. T. (2022). *Tinjauan yuridis tentang tugas camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Harefa, P. A. (2022). Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal El-Thawalib*, *3*(2), 363-374.

Indara, R. (2024). Problem kewenangan pelaksana tugas (PLT) dalam masa peralihan pemerintahan daerah sebelum dan sesudah pilkada serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Supremasi Hukum (JSSH),* 8(2), 1–15. https://doi.org/10.22437/jssh.v8i2.25963

Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, *10*(2), 326-353.

Komang, E. M., & Sudemen, I. W. (2025). Pola Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, *9*(1), 68-77.

Makbul, M. (2025). Best Practice Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Era Digital. *Jurnal Hukum dan Adminstrasi Publik*, *3*(1), 13-28.

Manullang, D. N. (2022). *Peranan kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai secara tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19* (Skripsi, Ilmu Administrasi Negara).

Nuranisa, N. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palopo.* Skripsi IAIN Palopo.

Nurchayo, S. A., Ali, A., Widagdo, T. H., & Sudiyono, S. (2024). Strategi manajemen talenta dalam pengembangan karir dengan praktek capacity building pada lingkup organisasi pemerintah daerah Kabupaten Semarang. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, *20*(2), 13-27.

Pratiwi, W. W. (2022). Kepemimpinan politik: Peran Walikota dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bontang. *Jurnal Politik Indonesia*, *8*(2).

Pratiwi, W. W. (2022). Kepemimpinan politik: Peran Walikota dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bontang. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics),* 8(2), 157–170. https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.39946

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration,* 1(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Rachmad, A., Azaria, E., Nur Xusan, Q., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum,* 16(02), 75–88. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.773

Rahma, A., Lestari, D. A., Nasiroh, R. A., & Afif, A. (2025). Menggali Akar Permasalahan: Kajian Mendalam Terhadap Data Kemiskinan Dan Mekanisme Bantuan Sosial. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(3), 192-198.

Sari, P. N. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan, Ketimpangan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Salam (Islamic Economics Journal)*, *3*(1), 41-61.

Utami, A. P., Ibrahim, A., & Adnan, M. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Law and Economics*, *3*(2), 83-98.

Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah Dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *4*(7), 1323-1332.